

**20. BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN**

| SUB BIDANG                      | SUB SUB BIDANG  | RINCIAN URUSAN DAERAH  |
|---------------------------------|---|--|
| <p><b>1. Otonomi Daerah</b></p> | <p>1. Urusan Pemerintahan:</p> <p>a. Kebijakan</p> <p>b. Pembinaan, Sosialisasi Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan</p> <p>c. Harmonisasi</p> <p>d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)</p> <p>e. <i>Database</i></p> | <p>Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala daerah.</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan.</p> <p>2. Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah daerah.</p> <p>1. Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p> <p>2. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah daerah dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi.</p> <p>1. Penyusunan LPPD kabupaten</p> <p>2. Penyampaian LPPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.</p> <p>Pengolahan <i>database</i> LPPD skala daerah.</p> |
|                                 | <p>2. Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus):</p> <p>a. Kebijakan</p> <p>b. Pembentukan Daerah</p>  | <p>1. Pengusulan penataan daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.</p> <p>1. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.</p> <p>2. Pembentukan kecamatan.</p> <p>3. a. Pengusulan perubahan batas daerah, nama dan pemindahan ibukota daerah.</p> <p>b. Pelaksanaan perubahan batas, nama daerah dan pemindahan ibukota kabupaten.</p>  |
|                                 | <p>c. Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah dan Otsus</p>  | <p>1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus.</p>  |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG   | RINCIAN URUSAN DAERAH  |
|------------|--|--|
|            | <p>d. Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah dan Otsus</p> <p>e. Pembangunan Sistem (<i>Database</i>) Penataan Daerah dan Otsus</p> <p>f. Pelaporan</p>                               | <p>1. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah daerah.</p> <p>1. Pembangunan dan pengelolaan <i>database</i> penataan daerah dan otsus skala daerah.</p> <p>2. Penyampaian data dan informasi penataan daerah skala daerah ke provinsi dan pemerintah.</p> <p>1. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah.</p> <p>2. Pengolahan database laporan penataan daerah.</p> <p>3. Penyampaian laporan penataan daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.</p> |
|            | <p>3. Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL):</p> <p>a. DPOD</p> <p>b. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)</p> <p>c. Fasilitasi Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah</p> | <p>1. Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah kabupaten untuk sidang DPOD.</p> <p>2. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD.</p> <p>1. Penyusunan Perda kabupaten.</p> <p>2. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada gubernur.</p> <p>3. Menyampaikan Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi.</p> <p>Membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah.</p>  |
|            | <p>4. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah:</p> <p>a. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) :</p> <p>1) Kebijakan</p> <p>2) Pembinaan</p> <p>b. Pengembangan</p>                        | <p>Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala daerah.</p> <p>Penerapan SPM daerah.</p>   |

| SUB BIDANG                         | SUB SUB BIDANG  | RINCIAN URUSAN DAERAH   |
|------------------------------------|---|---|
|                                    | <p>Kapasitas Daerah :</p> <p>1) Kebijakan</p> <p>2) Pelaksanaan</p> <p>3) Pembinaan</p>   | <p>1. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah.</p> <p>2. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas daerah.</p> <p>1. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas daerah.</p> <p>2. Fasilitasi implementasi rencana tindak daerah.</p> <p>3. Koordinasi pengembangan kapasitas daerah.</p> |
|                                    | <p>5. Pejabat Negara:</p> <p>a. Tata Tertib DPRD:<br/>Kebijakan</p> <p>b. Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH:<br/>Pelaksanaan</p> <p>c. Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD:<br/>Kebijakan</p> <p>d. Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH:<br/>Kebijakan</p> <p>e. Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) KDH:<br/>Kebijakan</p> | <p>Penetapan pedoman tata tertib DPRD kabupaten.</p> <p>Fasilitasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.</p> <p>Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD.</p> <p>Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati.</p> <p>Pelaksanaan pedoman LKPJ bupati.</p>                                       |
| <p><b>2. Pemerintahan Umum</b></p> | <p>1. Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama:</p> <p>a. Fasilitasi Tugas Pembantuan</p> <p>b. Fasilitasi Kerjasama</p>  | <p>1. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada desa.</p> <p>1. Penetapan kebijakan daerah di bidang kerjasama dengan pihak ketiga.</p>                                   |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG   | RINCIAN URUSAN DAERAH   |
|------------|--|---|
|            | <p>Daerah dengan Pihak Ketiga</p> <p>c. Kerjasama Antar Daerah</p> <p>d. Pembinaan Wilayah</p> <p>e. Koordinasi Pelayanan Umum</p> | <p>2. Pelaksanaan kerjasama daerah dengan pihak ketiga.</p> <p>3. Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga kepada provinsi.</p> <p>1. Pelaksanaan kerjasama antar daerah.</p> <p>2. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar daerah kepada provinsi.</p> <p>1. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di daerah dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/desa/ kelurahan di wilayahnya.</p> <p>3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/desa/ kelurahan di wilayahnya.</p> <p>4. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala daerah.</p> <p>5. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala daerah.</p> <p>Pelaksanaan pelayanan umum skala daerah.</p> |
|            | <p>2. Trantibum dan Linmas</p> <p>a. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</p>                                 | <p>1. Penetapan kebijakan daerah dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang:</p> <p>a. Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah.</p> <p>b. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.</p> <p>c. Kepolisipamongprajaan dan PPNS.</p> <p>d. Perlindungan masyarakat.</p> <p>2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS skala daerah.</p> <p>4. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala</p>  |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG   | RINCIAN URUSAN DAERAH  |
|------------|--|--|
|            | <p>b. Koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)</p>  | <p>daerah.</p> <p>5. Koordinasi dengan instansi terkait skala daerah.</p> <p>Koordinasi penegakan HAM skala daerah.</p>  |
|            | <p>3. Wilayah Perbatasan:</p> <p>a. Pengelolaan Perbatasan Antar Negara</p> <p>b. Perbatasan Daerah</p> <p>c. Toponimi dan Pemetaan Wilayah</p> <p>d. Pengembangan Wilayah Perbatasan</p>  | <p>1. Dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara.</p> <p>2. Dukungan koordinasi antar kecamatan/desa/kelurahan yang berbatasan dengan negara lain.</p> <p>Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan desa/kelurahan di daerah.</p> <p>1. Penetapan kebijakan daerah mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah daerah.</p> <p>2. Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala daerah.</p> <p>3. Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala daerah.</p> <p>1. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan skala daerah.</p> <p>2. Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala daerah.</p> |
|            | <p>e. Penetapan Luas Wilayah</p>   | <p>3. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan daerah.</p> <p>1. Inventarisasi perubahan luas wilayah daerah yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi.</p> <p>2. Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.</p>  |
|            | <p>4. Kawasan Khusus:</p> <p>a. Kawasan Sumber Daya Alam; Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral</p> <p>b. Kawasan Sumber Daya Buatan; Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita,</p> | <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala daerah.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala daerah.</p>  |

| SUB BIDANG                                    | SUB SUB BIDANG  | RINCIAN URUSAN DAERAH  |
|---|---|--|
|   | <p>Bendungan dan sejenisnya</p> <p>c. Kawasan Kepentingan Umum; Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum</p> <p>d. Kawasan Kelautan dan Kedirgantaraan</p>   | <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala daerah.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan skala daerah.</p>   |
|   | <p>5. Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana:</p> <p>a. Mitigasi Pencegahan Bencana</p> <p>b. Penanganan Bencana</p> <p>c. Penanganan Pasca Bencana</p> <p>d. Kelembagaan</p> <p>e. Penanganan Kebakaran</p> | <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala daerah.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana skala daerah.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala daerah.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala daerah.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala daerah.</p>   |
| <p><b>3. Administrasi Keuangan Daerah</b></p> | <p>1. Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah</p>  | <p>Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.</p>  |
|   | <p>2. Anggaran Daerah</p>   | <p>1. Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>2. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah.</p> <p>3. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan daerah.</p> <p>4. Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD.</p> <p>5. Penetapan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah.</p> <p>6. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa.</p> <p>7. Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa.</p> <p>8. Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>) antara kabupaten dan desa.</p> <p>9. Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar desa.</p> <p>10. Fasilitasi perencanaan dan penganggaran</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG  | RINCIAN URUSAN DAERAH   |
|------------|---|---|
|            |   | <p>pemerintahan desa.</p>   |
|            | <p>3. Pendapatan dan Investasi Daerah :</p> <p>a. Pajak dan Retribusi Daerah</p> <p>b. Investasi dan Aset Daerah</p> <p>c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro</p> <p>d. Pinjaman Daerah</p> | <p>1. a. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.</p> <p>b. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.</p> <p>c. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa.</p> <p>2. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah.</p> <p>3. Evaluasi Raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya.</p> <p>1. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah.</p> <p>3. Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah.</p> <p>4. Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala daerah.</p> <p>1. Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro daerah, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.</p> <p>3. Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro daerah, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.</p> <p>1. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU daerah.</p> <p>3. Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU daerah.</p> |
|            | <p>4. Dana Perimbangan :</p> <p>a. Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>b. Dana Alokasi Khusus (DAK)</p>  | <p>1. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU daerah.</p> <p>2. Pengelolaan DAU daerah.</p> <p>3. Pelaporan pengelolaan DAU daerah.</p> <p>1. Usulan program dan kegiatan daerah untuk didanai dari DAK.</p>  |

| SUB BIDANG                 | SUB SUB BIDANG   | RINCIAN URUSAN DAERAH  |
|----------------------------|--|--|
|                            | c. Dana Bagi Hasil (DBH)   | 2. Pengelolaan DAK.<br>3. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK.<br><br>1. Penyiapan data realisasi penerima DBH daerah.<br>2. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH.  |
|                            | 5. Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 1. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah dan desa.<br>2. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan APB desa.<br>3. Evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa.<br>4. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i> ).<br>5. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB desa. |
| <b>4. Perangkat Daerah</b> | 1. Kebijakan   | 1. Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah.<br>2. Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala daerah.<br>3. Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah.<br>4. Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah.<br>5. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah.   |
|                            | 2. Pengembangan Kapasitas  | 1. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah.<br>2. Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah.   |
|                            | 3. Pembinaan dan Pengendalian  | Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah.  |
|                            | 4. Monitoring dan Evaluasi   | 1. Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah.<br>2. Penyediaan bahan <i>database</i> perangkat daerah.   |
| <b>5. Kepegawaian</b>      | 1. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)  | 1. Penyusunan formasi PNSD di daerah setiap tahun anggaran.<br>2. Penetapan formasi PNSD di daerah setiap tahun anggaran.<br>3. Usulan formasi PNSD di daerah setiap tahun anggaran.   |
|                            | 2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)  | 1. Pelaksanaan pengadaan PNSD kabupaten<br>2. Usulan penetapan NIP   |



| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG   | RINCIAN URUSAN DAERAH   |
|------------|--|---|
|            | 3. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD.</li> <li>2. Pelaksanaan pengangkatan CPNSP.</li> <li>3. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi.</li> </ol>   |
|            | 4. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Penetapan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan daerah.  |
|            | 5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebutuhan diklat PNSD kabupaten.</li> <li>2. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat daerah.</li> <li>3. Pelaksanaan diklat skala daerah.</li> </ol>  |
|            | 6. Kenaikan Pangkat  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kenaikan pangkat PNSD kabupaten menjadi golongan ruang I/b s/d III/d.</li> <li>2. Usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian.</li> </ol>   |
|            | 7. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS daerah dalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kabupaten.</li> <li>2. Usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kabupaten.</li> <li>3. Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian eselon II PNS daerah</li> </ol> |
|            | 8. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Antar Instansi                             | Penetapan perpindahan PNSD kabupaten.   |
|            | 9. Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri                                       | Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD di daerah.  |
|            | 10. Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Akibat Tindak Pidana          | Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah.   |
|            | 11. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)  | Penetapan pemberhentian PNSD gol/ruang III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD.  |
|            | 12. Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)                                     | Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD di daerah.   |
|            | 13. Pengawasan dan Pengendalian  | Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala daerah.   |
|            | 14. Pembinaan dan  | Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan   |

| SUB BIDANG           | SUB SUB BIDANG  | RINCIAN URUSAN DAERAH  |
|----------------------|---|--|
|                      | Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) | manajemen PNS dilingkungan daerah.   |
| <b>6. Persandian</b> | 1. Kebijakan  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan persandian skala daerah.</li> <li>2. Penyelenggaraan palsan skala daerah.</li> <li>3. Penyelenggaraan sissan skala daerah.</li> <li>4. Penyelenggaraan kelembagaan persandian skala daerah.</li> </ol>   |
|                      | 2. Pembinaan SDM  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan kebutuhan SDM persandian skala daerah.</li> <li>2. Rekrutmen calon SDM persandian skala daerah.</li> <li>3. Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian.</li> </ol>   |
|                      | 3. Pembinaan Palsan   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan kebutuhan palsan skala daerah.</li> <li>2. Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra skala daerah.</li> <li>3. Pemeliharaan palsan tingkat O.</li> <li>4. Penghapusan palsan skala daerah.</li> </ol>   |
|                      | 4. Pembinaan Sissan   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan kebutuhan sissan skala daerah.</li> <li>2. Pengadaan sissan untuk jaring persandian skala daerah.</li> <li>3. Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan skala daerah.</li> <li>4. Penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian skala daerah.</li> </ol> |
|                      | 5. Pembinaan Kelembagaan  | Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau daerah.   |